

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KELEMAHAN PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dian Eka Rachmawati
dykha_luvblu@yahoo.com
Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research is meant to test the influence of economy growth, local government size, local own source revenue (PAD), local complexity, and capital expenditure to the weaknesses of internal control in local government. The samples are 38 local governments of districts/cities in East Java province in 2011-2013 periods. The secondary data of this research is the Summary of the Result Semester Examination (IHPS), data of PDRB, data of district amount, and data of the Report of Examination Result of Local Government Financial Report (LKPD) from the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) East Java Province representative. The examination has been done by using SPSS software 20.0 versions i.e. the examination of outlier data, classic assumption test and multiple regressions analysis. The result of classic assumption test show that the data have been normally distributed and the multicollinearity symptoms or even heteroscedasticity symptoms do not occur. The result of t test shows that economy growth variable has positive influence and capital expenditure variable has negative influence to the weaknesses of internal control. Partially the variables i.e. local government size, local own source revenue (PAD), and local complexity haven't significant influence to the weaknesses of internal control of local government.

Keywords: weaknesses of internal control, economy growth, size and local government complexity, local own source revenue (PAD), capital expenditure.

INTISARI

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah (PAD), kompleksitas daerah, dan belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Sampelnya adalah 38 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013. Data sekunder dalam penelitian ini adalah Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), data PDRB, data jumlah kecamatan, dan data Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Pengujian yang dilakukan menggunakan *software* SPSS versi 20.0 antara lain pengujian data outlier, uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data terdistribusi secara normal, tidak terjadi gejala multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif dan variabel belanja modal memiliki pengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Untuk variabel ukuran pemerintah daerah, PAD, dan kompleksitas daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Kata kunci: kelemahan pengendalian internal, pertumbuhan ekonomi, ukuran dan kompleksitas pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal.

PENDAHULUAN

Jatuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Soeharto pada tahun 1998 menjadi puncak kekesalan masyarakat yang menginginkan terselenggaranya pengelolaan pemerintahan yang baik (*good government governance*). Dengan bergantinya masa orde baru menjadi era reformasi mengakibatkan banyak perubahan yang dialami oleh negara

Indonesia. Salah satunya adalah perubahan sistem pemerintah yang sebelumnya bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang seluruh pengambilan keputusan diambil oleh pusat. Sedangkan desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang setiap pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola daerahnya sendiri.

Perubahan sistem pemerintah tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan sekarang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan inilah yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan otonomi daerah. Peraturan lainnya yang mendasari penyelenggaraan otonomi daerah yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Di dalam penerapan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada pemerintah daerah sehingga dapat mengurangi kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Yang nantinya di masa depan diharapkan dapat tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam suatu entitas atau instansi pemerintah kecurangan yang biasanya terjadi disebabkan karena lemahnya pengendalian internal pada entitas tersebut. Maka dari itu, untuk mengurangi terjadinya kecurangan atau penyimpangan tersebut, pemerintah wajib melakukan pengendalian internal yang baik dalam pelaksanaan kegiatannya. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 55 ayat 4 dan Pasal 56 ayat 4, pengelolaan APBN dan APBD telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pengendalian internal yang dilakukan oleh pemerintah berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012 yang diterbitkan oleh BPK RI atas pemeriksaan LKPD Tahun 2011 ditemukan 4.369 kasus kelemahan sistem pengendalian internal (SPI). Sedangkan pemeriksaan LKPD Tahun 2012 ditemukan 4.412 kasus kelemahan SPI. Dan untuk pemeriksaan LKPD Tahun 2013 ditemukan 5.103 kasus kelemahan SPI. Kasus kelemahan SPI tersebut terdiri dari tiga golongan yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta kelemahan struktur pengendalian intern.

Menurut IHPS I tahun 2012, pada umumnya kasus kelemahan sistem pengendalian intern terjadi karena pelaksana tidak/belum melakukan pencatatan secara akurat dan tidak menaati ketentuan dan prosedur yang ada, belum adanya kebijakan dan perlakuan akuntansi yang jelas, kurang cermat dalam melakukan perencanaan, belum melakukan koordinasi dengan pihak terkait, penetapan atau pelaksanaan kebijakan yang tidak tepat, belum menetapkan prosedur kegiatan, serta lemah dalam pengawasan dan pengendalian. Terhadap kasus-kasus tersebut, BPK telah merekomendasikan agar pimpinan entitas yang diperiksa segera menetapkan prosedur dan kebijakan yang tepat, meningkatkan koordinasi, melakukan perencanaan dengan lebih cermat, meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan, serta memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menjalankan era reformasi sekarang ini yang sistem pemerintahannya telah terdesentralisasi, sangat penting untuk meningkatkan pengendalian intern pada entitas atau instansi pemerintah. Kualitas pengendalian intern yang lebih baik dipercaya mampu untuk mengurangi jumlah kecurangan atau penyimpangan yang terjadi. Sehingga diharapkan masyarakat akan lebih meningkatkan rasa kepercayaannya kepada pemerintah. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya di Indonesia yang telah melakukan analisis terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal di sektor pemerintah. Penelitian tersebut antara lain Kristanto (2009), Martani dan Zaelani (2011), Putro (2013), Puspitasari (2013), Hartono, et al. (2014), serta Nurwati dan Trisnawati (2015).

Dari penelitian tersebut, salah satu faktor yang dianalisis adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dikatakan berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Hal ini dibuktikan dengan penelitian Martani dan Zaelani (2011) dan Putro (2013) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan menurut Puspitasari (2013) dan Hartono, et al. (2014) pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Berbeda dari kedua hasil di atas, Nurwati dan Trisnawati (2015) menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dengan kelemahan pengendalian internal pemerintah.

Ukuran suatu pemerintah daerah juga dikatakan memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Penelitian dari Kristanto (2009) membuktikan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Tetapi lain hal dengan Martani dan Zaelani (2011) serta Hartono, et al. (2014) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan hasil penelitian dari Putro (2013) serta Nurwati dan Trisnawati (2015) menyatakan bahwa ukuran pemerintah daerah tidak memiliki pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal.

Faktor lain yang mempengaruhi lemahnya pengendalian internal di pemerintah daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian dari Martani dan Zaelani (2011) menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Sedangkan menurut Putro (2013) Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Berbeda dari kedua hasil penelitian tersebut, Kristanto (2009), Puspitasari (2013), Hartono, et al. (2014), serta Nurwati dan Trisnawati (2015) menyatakan bahwa naik turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya yang dirasa mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah adalah kompleksitas daerah. Menurut penelitian Martani dan Zaelani (2011) ditemukan bahwa kompleksitas daerah (yang diukur menggunakan jumlah kecamatan) tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Sedangkan penelitian Puspitasari (2013) dan Hartono, et al. (2014) menemukan hasil yaitu kompleksitas daerah yang masing-masing diwakili dengan jumlah SKPD dan jumlah kecamatan berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Serta Nurwati dan Trisnawati (2015) menemukan bahwa kompleksitas daerah dengan indikator jumlah penduduk berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Kemudian belanja modal disebut juga mempunyai pengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal. Penelitian dari Kristanto (2009) menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Berbeda dengan Kristanto (2009), Nurwati dan Trisnawati (2015) menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas dan karena hasil penelitian yang berbeda-beda pula, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal di pemerintah daerah tersebut. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), kompleksitas daerah, dan belanja modal sebagai

faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2011-2013.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota?; (2) Apakah ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota?; (3) Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota?; (4) Apakah kompleksitas daerah berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota?; (5) Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota?. Dan dari penjelasan di atas pula dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut: (1) Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota; (2) Untuk menguji pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota; (3) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota; (4) Untuk menguji pengaruh kompleksitas daerah terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota; (5) Untuk menguji pengaruh ukuran belanja modal terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota.

TINJAUAN TEORETIS DAN HIPOTESIS

Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan pemberian otonomi kepada pemerintah daerah dapat melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik, dapat meningkatkan pengendalian dan pengawasan pada pemerintah daerah, dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pelaksanaan otonomi daerah juga diharapkan dapat meningkatkan daya saing antar daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi pada pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan cara lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah maupun antar pemerintah daerah. Selain itu juga pemerintah daerah harus lebih memperhatikan potensi dan keanekaragaman yang dimiliki oleh daerahnya, peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori ini menjelaskan mengenai hubungan antara pihak yang memberi wewenang yang disebut sebagai *principal* dengan pihak yang menerima wewenang yang disebut dengan *agent* dalam sebuah kontrak untuk melakukan jasa (*service*) atas nama *principal*. Hubungan antara *principal* dan *agent* dapat mengarah pada kondisi ketidakseimbangan informasi (*asymmetrical information*) karena *agent* berada pada posisi yang memiliki informasi yang lebih banyak tentang instansi/organisasi dibandingkan dengan *principal*. Adanya asimetri informasi ini menyebabkan kemungkinan munculnya konflik antara pihak *principal*

dan *agent*. Dalam kondisi yang tidak seimbang/asimetri tersebut, *agent* dapat melakukan tindakan yang tidak semestinya atau sering disebut *disfunctional behaviour*.

Seperti halnya di perusahaan, teori keagenan juga dapat terjadi pada instansi atau entitas publik. Dalam teori keagenan di sektor publik, yang menjadi *principal* adalah masyarakat dan pemerintah daerah bertindak sebagai *agent*. Pemerintah daerah sebagai *agent* tentu memiliki informasi yang lebih banyak dan terperinci dibandingkan dengan pihak masyarakat sebagai *principal*. Keberadaan *asymmetrical information* ini dapat memungkinkan terjadinya penyelewengan yang dilakukan oleh *agent*. Maka dari itu, dalam pelaksanaan kegiatannya pemerintah daerah harus lebih meningkatkan pengendalian internalnya sehingga kemungkinan penyelewengan yang terjadi tersebut dapat berkurang.

Kelemahan Pengendalian Internal

PCAOB (dalam Hartono et. al, 2014) mengatakan bahwa kelemahan pengendalian intern adalah kelemahan yang signifikan yang hasilnya jauh dari kondisi salah saji material pada laporan keuangan tahunan yang tidak dapat dicegah atau dideteksi. Badan Pengawas Keuangan (BPK) sebagai lembaga pemerintah memiliki tugas untuk mengawasi dan mengaudit laporan-laporan dari pemerintah daerah. Selain mengawasi dan mengaudit, BPK juga mempunyai tugas untuk mengawasi jalannya sistem pengendalian intern dalam instansi atau organisasi pemerintah.

Menurut BPK, kelemahan sistem pengendalian intern atas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga kelompok, yaitu: (1) Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (2) Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (3) Kelemahan struktur pengendalian intern. Dengan adanya indikator untuk mengetahui tingkat kelemahan pengendalian internal yang terjadi, maka pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan dan memperbaiki kualitas pengendalian internalnya agar lebih baik lagi.

Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Kuncoro (2004), suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonominya lebih tinggi daripada apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Sedangkan menurut Todaro (1995) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai suatu proses yang mantap dimana kapasitas produksi dari suatu perekonomian meningkat sepanjang waktu untuk menghasilkan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi pada pemerintah daerah dapat menggunakan nilai PDRB.

Menurut BPS, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan faktor produksinya. Angka-angka PDRB disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil). PDRB atas dasar harga berlaku (nominal) bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Maka, dalam penelitian ini digunakan PDRB dengan harga konstan untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi di pemerintah daerah kabupaten/kota.

Ukuran Pemerintah Daerah

Ukuran adalah suatu tolok ukur atau acuan untuk mengetahui seberapa besar, sedang, atau kecil suatu objek tertentu. Dalam teorinya pada entitas bisnis (sektor swasta), perusahaan menilai ukurannya dengan menggunakan total aktiva/aset yang dimilikinya. Teori tersebut menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu entitas, maka kelemahan

pengendalian intern akan semakin kecil. Doyle, et al. (2007) menjelaskan perusahaan besar cenderung lebih mampu menerapkan pengendalian internal yang memadai karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang mencukupi. Sedangkan pada sektor pemerintahan, Larassati, et. al dalam Nurwati dan Trisnawati (2015) menyatakan bahwa ukuran pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal. Semakin besar ukuran pemerintahan, maka semakin banyak pula kelemahan pengendalian internal yang ditemukan. Hal ini dikarenakan ukuran pemerintah daerah yang semakin besar cenderung memiliki pengawasan yang longgar, sehingga memerlukan pengendalian internal yang lebih memadai dan terinci.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Di dalam Undang-Undang tersebut juga menyebutkan bahwa tujuan pendapatan asli daerah adalah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, antara lain: (1) Pajak Daerah; (2) Retribusi Daerah; (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan (4) Lain-lain PAD yang Sah.

Kompleksitas Daerah

Salah satu faktor yang mempengaruhi pengendalian internal adalah kompleksitas suatu daerah. Kompleksitas merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hirarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya (Hartono, et al., 2014). Semakin kompleks suatu daerah dalam menjalankan kegiatan dan mempunyai area kerja yang tersebar luas, maka akan semakin sulit pengendalian internal tersebut untuk dijalankan.

Menurut penelitian terdahulu, terdapat beberapa proksi untuk mengetahui kompleksitas daerah, antara lain jumlah kecamatan, jumlah SKPD, dan jumlah penduduk. Dan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jumlah kecamatan untuk mengukur kompleksitas suatu daerah. Apabila sebuah daerah memiliki kecamatan yang banyak, maka diperkirakan akan menimbulkan beberapa masalah seperti sulit mengimplementasikan sistem pengendalian intern pada lingkungan kecamatan yang berbeda, masalah pengawasan dari pemerintah daerah, atau masalah saat pelaporan laporan keuangan.

Belanja Modal

Menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) kategori utama, antara lain: (1) Belanja Modal Tanah; (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin; (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan; (4) Belanja

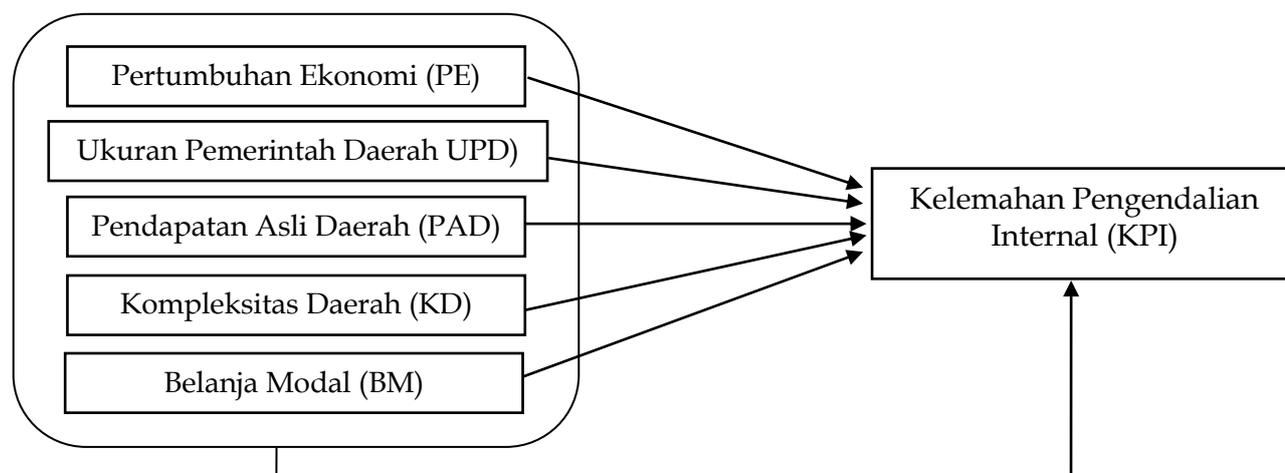
Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan; serta (5) Belanja Modal Fisik Lainnya. Tuanakkota dalam Kristanto (2009) merinci modus korupsi di daerah yang terkait dengan belanja modal, antara lain:

1. Ditemukan adanya pengusaha yang seringkali mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar pengusaha tersebut dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung kemudian harga barang/jasa dinaikkan (*markup*). Akhirnya selisih atau keuntungan tersebut dibagi-bagikan kepada kepala atau pejabat daerah.
2. Ditemukan pula bahwa antara pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif bersepakat untuk melakukan *markdown* atas aset Pemerintah Daerah dan *markup* atas aset pengganti dari pengusaha.
3. Para kepala daerah juga seringkali meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melakukan proyek.

Kondisi di atas menunjukkan bahwa belanja modal bisa menjadi obyek kecurangan atau korupsi politik dan korupsi administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif. Sehingga, pemerintah daerah harus selalu mengawasi dan meningkatkan pengendalian internalnya.

Rerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini, peneliti menjadikan kelemahan pengendalian internal sebagai variabel dependen. Dan untuk variabel independennya digunakan pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, Pendapatan Asli daerah (PAD), kompleksitas daerah, dan belanja modal. Sehingga jika digambarkan, rerangka pemikirannya adalah sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Setelah penjelasan yang diuraikan di atas sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1** : Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota.
- H2** : Ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota.
- H3** : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota.
- H4** : Kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota.

H5: Belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah kabupaten/kota.

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif. Objek penelitian ini adalah data sekunder yang berupa Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK RI, data PDRB dan data jumlah kecamatan yang diperoleh dari website resmi BPS, dan Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) yang diperoleh dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan pengambilan sampel cara nonprobabilitas yaitu dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2007:78), sampling jenuh merupakan teknik penentuan sampel jika semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Sesuai dengan objeknya, penelitian ini menggunakan data 38 pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2011-2013. Sehingga total seluruh sampel yang digunakan adalah 114 unit sampel.

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu berupa data dokumenter (*documentary data*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang didapatkan secara tidak langsung, melainkan melalui media perantara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library search*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data atau bahan dari berbagai sumber sebagai referensi untuk melakukan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur, catatan-catatan ilmiah, atau internet yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel Dependen

Kelemahan Pengendalian Internal

Menurut BPK, kelemahan pengendalian intern atas laporan keuangan daerah dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan kelemahan struktur pengendalian intern. Sehingga variabel ini diukur dengan menjumlahkan banyaknya temuan kasus kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah yang terdapat pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang diterbitkan oleh BPK RI.

Kelemahan Pengendalian Internal = jumlah temuan kasus KPI

Variabel Independen

1. Pertumbuhan ekonomi

Yaitu kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi yang terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi pemerintah daerah di dalam penelitian ini dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada pemerintah kabupaten/kota.

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRBt1} - \text{PDRBt0}}{\text{PDRBt0}} \times 100\%$$

2. Ukuran pemerintah daerah

Dapat menggambarkan besar kecilnya skala ekonomi suatu pemerintah daerah. Ukuran pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan jumlah atau total aset yang

dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk Log natural (Ln).

$$\text{Ukuran Pemerintah Daerah} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$$

3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = \text{Ln} (\text{Pendapatan Asli Daerah})$$

4. Kompleksitas daerah

Merupakan tingkatan yang ada dalam sebuah organisasi, diantaranya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatan di dalam hirarki organisasi serta tingkat sejauh mana unit-unit organisasi tersebar secara geografis untuk mencapai tujuannya.

$$\text{Kompleksitas Daerah} = \text{jumlah kecamatan}$$

5. Belanja modal

Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dikelompokkan menjadi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, dan belanja modal fisik lainnya. Sehingga variabel belanja modal diukur dengan menjumlahkan macam-macam jenis belanja modal tersebut.

$$\text{Belanja Modal} = \text{Ln} (\text{Belanja Modal})$$

Teknik Analisis Data

1. Pengujian Data *Outlier*

Outlier adalah data yang menyimpang dan terlihat sangat jauh berbeda dengan data lainnya. Pengujian data *outlier* digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data yang menyimpang dari kumpulan data yang tersebut. Untuk menguji data *outlier* dapat dilakukan dengan cara menentukan nilai ambang batas yang akan dikategorikan sebagai data *outlier* dengan cara mengkonversi nilai data penelitian ke dalam *standard score* atau *Z-Score*. Batas nilai *Z-Score* yang digunakan dalam penelitian ini berada pada rentang ± 2 .

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel-variabel penelitian telah memiliki distribusi normal atau belum. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2006:110).

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* (TOL) dan lawannya *Varians Inflation Factor* (VIF).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2006:105). Dalam penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas peneliti menggunakan metode *Rank Spearman*.

3. Analisis Regresi Berganda

Tujuan dari analisis regresi berganda ini adalah untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hasil dari analisis regresi ini juga menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Bentuk umum dari fungsi Kelemahan Pengendalian Internal (KPI) adalah sebagai berikut:

$$KPI = \alpha + \beta_1 PE + \beta_2 UPD + \beta_3 PAD + \beta_4 KD + \beta_5 BM + e$$

Keterangan :

KPI	= Kelemahan Pengendalian Internal
α	= Konstanta
PE	= Pertumbuhan Ekonomi
UPD	= Ukuran Pemerintah Daerah
PAD	= Pendapatan Asli Daerah
KD	= Kompleksitas Daerah
BM	= Belanja Modal
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$	= Koefisien Regresi
e	= Kesalahan gangguan (<i>error</i>)

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Pengujian kelayakan model ini dilakukan untuk mengetahui apakah model atau persamaan regresi yang telah terbentuk tersebut layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dalam penelitian.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan persamaan regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependennya. Tetapi karena R^2 mengandung kelemahan, maka digunakanlah koefisien regresi yang telah disesuaikan atau disebut *Adjusted R Square*. Koefisien regresi yang telah disesuaikan berarti koefisien tersebut telah dikoreksi dengan memasukkan jumlah variabel dan ukuran sampel yang digunakan. Sehingga nilai *Adjusted R Square* dapat naik dan turun oleh adanya penambahan variabel baru dalam model regresi (Suliyanto, 2011:59).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen secara individual atau parsial. Dalam uji t ini, dapat dilakukan perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t tabelnya ataupun melihat nilai signifikansinya. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengujian Data *Outlier*

Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari 114 unit sampel yang digunakan terdapat 31 sampel yang *outlier*. Maka, dapat dilakukan pengurangan dengan membuang data *outlier* tersebut. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini menjadi 83 unit sampel. Setelah *outlier* terbuang, maka dilakukan pengujian ulang hingga tidak terdapat *outlier* lagi.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas Data

Gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* menunjukkan bahwa plot data berada dan menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Dan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Dari uji multikolinearitas diketahui bahwa kelima variabel independen memiliki nilai TOL > 0,10 dan nilai VIF < 10, maka hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Dari uji heteroskedastisitas menggunakan metode *Rank Spearman* diperoleh hasil bahwa kelima variabel independen memiliki nilai *Sig. (2-tailed)* > 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independennya. Berikut merupakan hasil dari analisis regresi berganda dari data yang diolah:

Tabel 1
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	6,207	12,230		,507	,613		
PE	160,660	78,127	,273	2,056	,043	,627	1,595
1 UPD	,335	,950	,044	,352	,726	,701	1,427
PAD	-,525	,794	-,100	-,661	,510	,487	2,053
KD	,075	,041	,215	1,812	,074	,785	1,274
BM	-,754	,350	-,247	-2,154	,034	,836	1,196

a. Dependent Variable: KPI
Sumber: Output SPSS

Dari tabel 1 yang menunjukkan hasil dari analisis regresi berganda di atas, dapat disusun fungsi atau persamaan regresi berganda yaitu sebagai berikut:

$$KPI = 6,207 + 160,660 PE + 0,335 UPD - 0,525 PAD + 0,075 KD - 0,754 BM + e$$

Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)

Uji kelayakan model ini dilakukan untuk mengetahui apakah persamaan regresi yang telah terbentuk layak untuk dijadikan sebagai alat estimasi dalam penelitian. Hasil uji kelayakan model regresi disajikan dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Kelayakan Model Regresi (*Goodness of Fit*)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	73,485	5	14,697	2,722	,026 ^b
Residual	415,744	77	5,399		
Total	489,229	82			

a. Dependent Variable: KPI
b. Predictors: (Constant), BM, PE, KD, UPD, PAD
Sumber: Output SPSS

Dari hasil pengujian kelayakan model regresi (*goodness of fit*) di atas, diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2,722 dengan nilai signifikansi sebesar 0,026. Karena nilai signifikansi yang diperoleh yaitu 0,026 lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi yang terbentuk layak atau baik untuk dijadikan sebagai alat estimasi dan dapat dilanjutkan ke pengujian selanjutnya.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Dalam penelitian ini digunakan *Adjusted R Square* untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel independen dalam menerangkan varians dari variabel dependennya. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel 3 berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,388 ^a	,150	,095	2,32363

a. Predictors: (Constant), BM, PE, KD, UPD, PAD

b. Dependent Variable: KPI

Sumber: Output SPSS

Dari tabel 3 di atas, diketahui bahwa nilai *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,095. Nilai ini menunjukkan bahwa variasi kelemahan pengendalian internal dapat dijelaskan oleh variasi pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, kompleksitas daerah, dan belanja modal sebesar 9,5 persen. Dan sisanya yaitu 90,5 persen dipengaruhi oleh variabel yang lain.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen secara individual. Hasil uji signifikansi parameter individual disajikan dalam tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Parameter Individual (Uji t)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				
1	(Constant)	6,207	12,230		,507	,613
	PE	160,660	78,127	,273	2,056	,043
	UPD	,335	,950	,044	,352	,726
	PAD	-,525	,794	-,100	-,661	,510
	KD	,075	,041	,215	1,812	,074
	BM	-,754	,350	-,247	-2,154	,034

a. Dependent Variable: KPI

Sumber: Output SPSS

Dari kelima variabel independen tersebut terdapat dua variabel yang memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah karena nilai Sig. < 0,05 yaitu variabel pertumbuhan ekonomi dan belanja modal. Sedangkan tiga variabel independen lainnya yaitu ukuran pemerintah daerah, pendapatan asli daerah, dan kompleksitas daerah memiliki nilai Sig. > 0,05. Maka, ketiga variabel tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Pertumbuhan Ekonomi

Hasil uji signifikansi parameter individual (uji t) menunjukkan bahwa besarnya nilai t hitung dari variabel Pertumbuhan Ekonomi (PE) ialah sebesar 2,056 dengan nilai Sig. yaitu 0,043. Karena nilai Sig. $0,043 < 0,05$ dan arah koefisiennya positif, maka disimpulkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah secara parsial. Sehingga dalam hal ini H1 diterima.

Hubungan positif atau searah dalam hasil ini mengandung arti bahwa pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka tingkat kelemahan pengendalian internalnya juga tinggi. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Doyle, et al. (2007) di sektor swasta yang menjelaskan apabila tingkat pertumbuhan perusahaan berhubungan positif dengan masalah tentang pengendalian internal. Di masa globalisasi seperti sekarang ini, pertumbuhan perusahaan terjadi sangat cepat dan mengakibatkan terjadi banyak perubahan. Hal tersebut memungkinkan masalah pengendalian internal terjadi. Dan ternyata menurut hasil penelitian ini, hal ini juga terjadi pada sektor pemerintah daerah.

Ukuran Pemerintah Daerah

Nilai t dari variabel Ukuran Pemerintah Daerah (UPD) ialah sebesar 0,352 dengan nilai Sig. yaitu 0,726. Karena Sig. $0,726 > 0,05$ dan arah koefisiennya positif, maka disimpulkan bahwa variabel ukuran pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Sehingga dalam hal ini H2 ditolak.

Hasil penelitian ini dapat diartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan ukuran suatu pemerintah daerah tidak akan mempengaruhi banyaknya kasus kelemahan pengendalian internal yang terjadi. Sehingga pengendalian internal yang diterapkan di dalam pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur dalam pengelolaan asetnya sudah dilaksanakan dengan baik, memadai, dan terperinci karena pemerintah daerahnya telah memiliki sumber daya yang cukup. Hasil ini juga mengindikasikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur telah melaksanakan otonomi daerah dengan baik dengan cara mengelola dan mengawasi aset yang dimiliki daerahnya. Hasil ini tidak mendukung penelitian Doyle, et al. (2007) pada sektor swasta yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran suatu entitas, maka kelemahan pengendalian intern akan semakin kecil.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t hitung sebesar - 0,661 dan nilai Sig. sebesar 0,510. Nilai Sig. $0,510 > 0,05$ serta nilai koefisiennya yang negatif mengindikasikan bahwa variabel pendapatan asli daerah secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini, H3 juga ditolak.

Pendapatan asli daerah (PAD) secara individu tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah dikarenakan beberapa tahun belakangan ini banyak terjadi korupsi dan penyelewengan dana APBD yang melibatkan pejabat-pejabat daerah sehingga menjadikan PAD sebagai sasaran korupsi yang mereka lakukan. Maka, pengendalian internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah menjadi lebih ditingkatkan lagi sehingga kasus atau masalah tentang pengendalian internal dapat diminimalisir.

Hasil ini mendukung penelitian sebelumnya yaitu Kristanto (2009), Puspitasari (2013), Hartono, et al. (2014), dan Nurwati dan Trisnawati (2015) yang menyatakan bahwa naik turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak akan mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Selain karena pengendalian internal yang ditingkatkan dalam pengelolaan PAD, hal lain yang menjadi alasan tidak adanya pengaruh PAD terhadap kelemahan pengendalian internal adalah karena pemerintah daerah yang mempunyai PAD yang lebih besar belum tentu pengendalian internal yang diterapkannya lebih baik daripada pemerintah daerah yang mempunyai PAD lebih kecil. Oleh karena itu, PAD harus dikelola dengan baik dan efisien untuk kepentingan publik. Di lain sisi, hasil ini tidak mendukung penelitian dari Martani dan Zaelani (2011) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah maupun penelitian dari Putro (2013) yang menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Kompleksitas Daerah

Sedangkan variabel Kompleksitas Daerah (KD) memiliki nilai t sebesar 1,812 dengan nilai Sig. 0,074. Meskipun arah koefisiennya positif tetapi karena nilai Sig. 0,074 > 0,05, maka disimpulkan bahwa variabel kompleksitas daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Sehingga dalam penelitian ini H4 ditolak.

Hasil yang tidak signifikan disini mengartikan bahwa perubahan peningkatan maupun penurunan kompleksitas suatu daerah yang diukur dengan jumlah kecamatan tidak akan mempengaruhi banyaknya kasus kelemahan pengendalian internal yang terjadi. Hal ini mungkin disebabkan karena indikator variabel kompleksitas daerah yang memiliki karakteristik yang berbeda antara sektor swasta dengan sektor pemerintahan ataupun indikator yang digunakan peneliti kurang tepat. Jumlah kecamatan yang digunakan untuk mengukur variabel kompleksitas daerah pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tetap atau tidak berubah selama tahun yang peneliti gunakan. Karena selama tahun 2011-2013, kabupaten/kota di Jawa Timur tidak mengalami perluasan daerah sehingga kompleksitas daerah tidak dapat terukur secara efektif.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian dari Martani dan Zaelani (2011) yang menemukan bahwa jumlah kecamatan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Tetapi hasil ini tidak berhasil mendukung penelitian dari Puspitasari (2013) dan Hartono, et al. (2014) yang menemukan hasil yaitu kompleksitas daerah berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal maupun penelitian Nurwati dan Trisnawati (2015) yang menyatakan bahwa kompleksitas daerah berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah.

Belanja Modal

Dan nilai t hitung untuk variabel Belanja Modal (BM) yaitu sebesar - 2,154 dengan nilai Sig. 0,034. Karena nilai Sig. 0,034 > 0,05, dan arah koefisiennya negatif, maka disimpulkan bahwa variabel belanja modal memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah secara parsial. Sehingga dalam penelitian ini menyatakan bahwa H5 ditolak.

Hubungan negatif yang dimiliki belanja modal dengan kelemahan pengendalian internalnya dapat diinterpretasikan bahwa jika anggaran belanja modal yang dialokasikan oleh pemerintah daerah besar, maka jumlah kasus pengendalian internal akan berkurang. Jumlah anggaran belanja modal yang relatif besar membuat pemerintah daerah lebih

berhati-hati dalam memanfaatkan dan mengelolanya. Sehingga pemerintah daerah berusaha untuk menerapkan pengendalian internal yang baik dan memadai terhadap pengelolaan belanja modal.

Hasil ini membantah pernyataan bahwa seringkali belanja modal menjadi obyek kecurangan sehingga kelemahan pengendalian internal yang terjadi dalam pemerintah daerah akan meningkat. Hal ini menunjukkan pula bahwa pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tidak banyak terjadi kasus kecurangan seperti korupsi dana APBD khususnya terhadap anggaran belanja modal pemerintah. Sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik pula dengan cara mengelola anggaran khususnya belanja modal seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat. Hasil dari penelitian ini tidak sesuai dengan Nurwati dan Trisnawati (2015) yang menunjukkan bahwa variabel belanja modal berpengaruh positif terhadap kelemahan pengendalian internal. Selain Nurwati dan Trisnawati (2015), hasil ini juga bertentangan dengan penelitian Kristanto (2009) yang menunjukkan bahwa belanja modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari beberapa pengujian yang telah dilakukan terhadap data pertumbuhan ekonomi, ukuran pemerintah daerah, PAD, kompleksitas daerah, belanja modal, dan kelemahan pengendalian internal menunjukkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Dari pengujian data outlier, diperoleh hasil bahwa dari 114 unit sampel yang digunakan terdapat 31 sampel data yang menyimpang. Sehingga dalam penelitian ini hanya menggunakan sampel sebanyak 83 unit; (2) Hasil dari pengujian signifikansi parameter individual (uji t) masing-masing variabel independen menunjukkan bahwa: a) Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal; b) Ukuran pemerintah daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal; c) PAD tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal secara parsial; d) Kompleksitas daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal; dan e) Belanja modal memiliki pengaruh yang negatif signifikan terhadap kelemahan pengendalian internal secara parsial.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah: (1) Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan maupun mempertahankan pengendalian internalnya yang sudah baik agar kelemahan atau masalah tentang pengendalian internal dapat berkurang; (2) Bagi penelitian mendatang diharapkan dapat meneliti daerah yang lebih luas dan periode penelitian yang lebih banyak agar hasil yang diperoleh juga akan lebih baik dan menunjukkan kondisi yang lebih umum; (3) Bagi penelitian berikutnya juga dapat menggunakan indikator lain yang mungkin lebih cocok untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kelemahan pengendalian internal pemerintah daerah. Seperti kompleksitas daerah dapat diukur dengan jumlah SKPD ataupun jumlah penduduknya; (4) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tidak hanya menggunakan data sekunder, tetapi juga wawancara dengan pihak pemerintah daerahnya agar informasi yang diperoleh lebih jelas dan lengkap terutama seputar pengendalian internal yang diterapkannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, A. 2013. Teori Keagenan (Agency Theory). <http://anggyansyah.blogspot.co.id/2013/01/teori-keagenan-agency-theory.html?m=1>. Diakses tanggal 23 September 2015.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2012. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2012*. Buku I Ringkasan Eksekutif. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
- _____. 2013. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2013*. Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
- _____. 2014. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2014*. Buku II Pemeriksaan Laporan Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan RI. Jakarta.
- Doyle, J. T., W. Ge, dan S. E. McVay. 2007. Determinant of Weaknesses in Internal Control Over Financial Reporting. *Journal of Accounting End Economics* 44: 193-233.
- Ghozali. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Cetakan 4. BP Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hartono, R., A. Mahmud, dan N. S. Utaminingsih. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Intern Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi XVII*. Mataram, Lombok.
- Kristanto, S. B. 2009. Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal. *Jurnal Akuntansi UKRIDA* 9 (1): 1-17.
- Kuncoro, M. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Erlangga. Jakarta.
- Martani, D. dan F. Zaelani. 2011. Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah Studi Kasus di Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XIV*. Aceh.
- Nurwati, I. dan R. Trisnawati. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelemahan Pengendalian Internal Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Periode 2011-2012). *Prosiding Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Puspitasari, T. 2013. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern pada Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah di Indonesia). *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Putro, P. U. W. 2013. Pengaruh PDRB dan Ukuran Terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah dengan PAD sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
- _____. Nomor 71 Tahun 2010 *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Todaro, M. P. 1995. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi 4. Erlangga. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 *Perbendaharaan Negara*. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- _____. Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

- Setiawati, Y. 2012. Agency Theory (Teori Keagenan). <http://yulinistibarcelonista.blogspot.co.id/2012/11/agency-theory-teori-keagenan.html?m=1>. Diakses tanggal 23 September 2015.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Alfabeta. Bandung.
- Suliyanto. 2011. *Ekonometrika Terapan: Teori & Aplikasi dengan SPSS*. Edisi I. Andi. Yogyakarta.

